



SONGSONG PERINGATAN HAKORDIA 2025

Diluncurkan di Yogya, e-Audit Katalog V6 Cegah Potensi Korupsi

YOGYA (KR) - Fitur atau layanan e-Audit pada Katalog Versi 6 (V6) secara resmi diluncurkan di Kota Yogya, Senin (8/12). Kolaborasi tiga lembaga negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menjadi 'senjata' baru dalam mencegah potensi korupsi.

Walikota Yogya Hasto Wardoyo pun mengapresiasi dipilihnya Yogya sebagai tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Termasuk di antaranya peluncuran fitur e-Audit Katalog V6 yang selanjutnya digunakan serentak di seluruh Indonesia untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik. "Tentu kami akan mengikuti sepenuhnya. Kami pun optimis ini akan memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas," tandasnya di sela peluncuran e-Audit Katalog V6 yang dige-

lar di Graha Pandawa Balaikota. Peluncuran tersebut turut disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya selaku pembina Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). E-Audit Katalog V6 itu selanjutnya akan digunakan oleh seluruh APIP di Indonesia dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Hasto mengaku, pengadaan barang dan jasa tidak sekadar administratif melainkan akan berimbas



Seremonial peluncuran e-Audit Katalog V6 di Graha Pandawa Balaikota Yogya.

pada jalannya pembangunan. Sehingga tidak sekadar harus mengedepankan akuntabilitas melainkan asas kemanfaatan. "Yogya ini hanya memiliki sumber daya manusia, maka kami pun berharap agar bisa terus dibimbing. Akuntabilitas ini menjadi kunci tata kelola yang lebih baik," imbuhnya. Terkait e-Audit Katalog V6, Pimpinan KPK Agus Joko Pramono, menjelaskan

ada tiga pesan strategis dalam pemanfaatan fitur tersebut yakni populasi transaksi seluruhnya diawasi oleh mesin, tidak ada lagi egosektoral data serta terwujudnya orkrestasi kolaborasi trisula pengawasan (LKPP, BPKP dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi). Diakukannya, pengadaan barang dan jasa menjadi lahan basah dalam potensi korupsi. Oleh karena itu meski dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah terdigitalisasi namun jika tidak diimbangi dengan pola pengawasan ekstra maka ibarat membangun jalan tol tanpa CCTV. Keberadaan e-Audit Katalog V6 pun menjadi mitigasi atau early warning system (EWS) potensi korupsi. "Pengawasan yang efektif itu bukan seberapa banyak yang dipenjarakan melainkan sebesar besar keuangan negara yang bisa diselamatkan. Ruhnya berada pada aspek pencegahan. Semoga peluncuran ini bukan sekadar seremonial,"

urainya. Sementara Kepala LKPP selaku penyedia katalog elektronik, Sarah Sadiqa, memaparkan dalam fitur e-Audit Katalog V6 terdapat empat titik fokus yang lahir dari kluster masalah APIP. Masing-masing mampu memotret pembelian berulang pada penyedia yang sama, pembelian produk yang baru saja ditayangkan, proses negosiasi yang relatif cepat, dan harga tidak wajar dalam transaksi. Seluruh temuan itu berindikasi tindakan koruptif sehingga perlu ditelaah lebih lanjut oleh APIP di masing-masing level pemerintah. Dengan demikian fitur itu merupakan transformasi digital pengawasan yang lebih kuat. "Kompleksitas transaksi di katalog elektronik meningkatkan signifikan. Sistem pengadaan pun membutuhkan mekanisme audit yang modern dan responsif," tandasnya. Senada diungkapkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Menurutnya, 40 persen kasus yang ditan-

ganinya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terutama di sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Modusnya antara lain persekongkolan tender, spesifikasi mengarah, mark up harga, transaksi fiktif, pengaturan pemenang, suap dan gratifikasi. Dengan begitu, kehadiran e-Audit Katalog V6 menjadi filter dari berbagai celah tindakan korupsi serta mencegahnya dari pelanggaran. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 13 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005